

**PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH PEMERINTAH DESA BABAKAN
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

ITAH MASITAH
masitahitah@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh
Jalan R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ternyata masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; kedua, bagaimana hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; ketiga, Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, dan wawancara. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1). Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa Babakan kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Adanya hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa yang antara lain dikarenakan kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium nyamuk yang ada kurang mendapat pemeliharaan sehingga keberadaannya kurang menarik minat wisatawan untuk datang, dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai sehingga apabila dipromosikan secara rutin takut mengecewakan pengunjung serta masih kurangnya strategi yang dilaksanakan oleh pengelola yang disebabkan oleh dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata masih belum optimal. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa maka dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan keberadaan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang dapat membantu pengelola dalam melakukan pengembangan desa wisata, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan desa wisata.

Kata Kunci: *Pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Desa*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh

kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi,

informasi), warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran.

Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 bab II pasal 4 dikatakan bahwa dampak dari pengembangan pariwisata di Indonesia sangat luas, mulai dari dampak terhadap ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemiskinan sampai kepada pelestarian alam. Undang-undang memberikan otonomi kepada masing-masing daerah dalam urusan pengembangan daerahnya. Rancangan program pengembangan pariwisata misalnya pengembangan desa wisata sudah banyak dilakukan hanya saja implementasinya masih banyak hambatan.

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata minat khusus. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.

Masyarakat lokal pada pengembangan desa wisata memiliki peranan yang cukup besar, dimana masyarakat yang mengoperasikan dan mengontrol berjalannya pengembangan desa wisata baik dari penentuan produk hingga manfaat yang diterimanya. Manfaat yang

diterima oleh masyarakat lokal adalah mendorong mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan alam sehingga mampu menyerap tenaga masyarakat lokal, menciptakan wirausaha, dan menciptakan kegiatan positif di bidang pertanian.

Kemunculan desa wisata di sektor pariwisata mampu memberikan alternative baru kepada wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Desa wisata tidak hanya mengajak wisatawan untuk menikmati keindahan alam saja, melainkan mempelajari dan mengenalkan kehidupan masyarakat pedesaan secara langsung.

Banyaknya potensi yang ada di dalam desa wisata akan mengundang banyak wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Wisatawan yang berkunjung ke desa wisata akan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih mandiri dalam mensejahterakan kehidupannya melalui penyediaan jasa dan menjual produk yang diciptakan dari berbagai potensi yang dimiliki di desa tersebut.

Pemasaran pada sektor pariwisata sangat berbeda dengan pemasaran pada umumnya dikarenakan pemasaran pariwisata lebih menonjolkan penggambaran pada fasilitas yang disediakan oleh jasa destinasi secara menyeluruh yang dilengkapi dengan fasilitas dari sektor lainnya. Adanya kegiatan pemasaran dalam sektor pariwisata bertujuan untuk membentuk pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tujuan mengejar pertumbuhan destinasi dan menjaga keberlangsungannya sumber daya alam, budaya, sejarah, sosial dan ekonomi pada destinasi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran menjadi alat pengelolaan yang sangat efektif karena mampu memastikan target wisatawan yang datang, mampu menarik wisatawan yang setuju dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kapasitas destinasi itu sendiri.

Pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tidak hanya di titik beratkan pada obyek wisata yang telah dikenal masyarakat luas saja namun ada alternatif andalan lainnya yang mulai dikembangkan yaitu Desa Wisata dengan potensi alam, seni dan budayanya. Desa wisata lebih bergerak pada

bidang studi pengembangan budaya dan pariwisata berbasis potensi lokal.

Pangandaran sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pangandaran memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan sekaligus tantangan berat untuk menciptakan manajerial pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonomi baru itu memberikan pondasi awal yang sangat penting dan menentukan terhadap keberlanjutan dan keberhasilan serta kemajuan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang. Kesalahan awal dalam melangkah akan berakibat fatal ke depannya. Karena untuk memperbaiki kekeliruan itu akan membutuhkan biaya tinggi (*high cost*). Oleh karena itu pondasi awal ini memiliki nilai strategis yang paling utama dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran secara berkesinambungan. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran sesungguhnya sudah memiliki potensi yang memadai yang tersebar di setiap wilayah Kabupaten Pangandaran. Potensi tersebut terutama adalah bidang pariwisata yang salah satunya adalah desa wisata. Potensi desa wisata khususnya di Desa Babakan perlu mendapat pengembangan dan pemberdayaan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pengelolaan Desa Wisata di Desa Babakan memerlukan manajemen yang baik untuk pengembangan desa wisata tersebut. Manajemen yang dibutuhkan Desa Wisata seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh wisatawan, sehingga penyedia jasa dapat merumuskan dan merencanakan pemasaran produk dengan baik. Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pariwisata yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai produk destinasi kepada wisatawan.

Salah satu desa wisata yang memiliki komponen yang berbeda dengan desa wisata lainnya adalah Desa Wisata Pangandaran. Desa Wisata Pangandaran mempunyai Daya Tarik Destinasi Wisata *Ecotourism* atau Pariwisata Berbasis Lingkungan dan Pariwisata Pendidikan. Wisatawan dapat mengunjungi

sanggar tari Lingga dan bisa juga belajar menari serta mengunjungi beberapa aktifitas pengrajin pembuat gula nipah, pembuat gula kelapa, pengrajin ikan asin (Jambal), Pengrajin asesoris, Kuliner, Aktifitas Petani dan Mengunjungi Kampung Nelayan setra mengunjungi Sentral Pembuatan Kantong Kamuti (Tas Kaneron yang terbuat dari daun Gebang) serta bisa mengunjungi Laboratorium Nyamuk satu-satunya di Indonesia. Wisatawan juga dapat mengunjungi Destinasi Wisata Edukasi Konservasi Mangrove dan Nyamplung di Pantai Buleksetra Pangandaran, selain itu para wisatawan dapat melihat dan meneliti keseharian penduduk, melihat kegiatan menangkap ikan dengan jaring arad, berjalan-jalan di sekitar pelabuhan, memancing, belajar membibitkan dan menanam mangrove, meneliti tanaman pantai, melintasi hutan *mangrove*, *bersurfing*, *boating*, *truculent*, dan menikmati panorama alam pantai buleksetra yang masih khas dengan deburan ombak yang bersahabat dengan indahnya Panorama Alam.

Desa Babakan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang mandiri, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Potensi wisata yang dimiliki adalah daya tarik (*attraction object*) meliputi Desa wisata Nelayan atau bahari Pangandaran, sentra produksi gula merah dan ikan asin serta pohon mangrove serta beberapa jenis tumbuhan lainnya, dukungan fasilitas wisata seperti hotel, villa dan home stay, serta dukungan *accessibility* sebagai daerah jalur wisata (*primary destination*) yang sangat strategis di daerah wisata serta produk wisata lokal dari usaha mikro kecil menengah (UMKM). Komitmen seluruh *stakeholder* desa (Tomas, Toga, Aparat desa) di Desa Babakan untuk mengembangkan desa wisata yang ramah lingkungan merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk pengembangan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian potensi yang dimiliki oleh Desa Babakan belum dikembangkan menjadi sebuah Kawasan Desa wisata seni dan budaya. Padahal dengan pengembangan Desa ini menjadi sebuah Kawasan Desa wisata seni dan budaya, dapat memberi dampak positif bagi berbagai pihak, baik itu masyarakat sekitar, Pemerintah maupun swasta, dan yang paling penting adalah lestainya kebudayaan yang

merupakan warisan budaya untuk kemajuan pariwisata Desa Babakan.

Begitupula dengan hasil observasi yang penulis lakukan, dimana dalam pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ternyata masih belum optimal, yang dibuktikan dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah desa kurang memberikan dukungan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan potensi desa wisata sehingga keberadaan desa wisata yang ada di Desa Babakan kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Pemerintah desa kurang bekerjasama dengan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengembangkan potensi desa wisata sehingga keberadaan desa wisata kurang berkembang, seperti masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang menjadi destinasi desa wisata.
3. Pemerintah desa kurang melakukan promosi Desa Wisata Pangandaran sehingga masih banyak masyarakat luas yang belum mengenal dan mengetahui keberadaan desa wisata Pangandaran, terutama di luar wilayah Pangandaran sehingga hal ini dibutuhkan media promosi yang dapat menjangkau masyarakat luas sehingga Desa Wisata Pangandaran dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh keberadaan desa wisata yang ada di Desa Babakan kurang dikembangkan dengan baik oleh pemerintah desa, oleh karena itu agar desa wisata ini dapat terus berkembang tentu dibutuhkan pengelolaan atau manajemen. Tanpa manajemen yang baik tentu sebuah desa wisata akan mengalami kemunduran yang mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan baik dalam lingkup dan skala regional, nasional, bahkan internasional, dengan begitu sebuah obyek wisata harus bisa mempertahankan potensi yang sudah dimiliki.

Pengembangan desa wisata dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pariwisata, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha pengembangan ini

dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pariwisata berbasis masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan dari *stakeholder* lain seperti pemerintah daerah dan sektor swasta yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2015 tentang Desa Pasal 124, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Oleh karena itu peran Pemerintah Desa sangatlah menentukan dalam mencapai keberhasilan. Pemerintah Desa Babakan merumuskan strategi pengembangan desa wisata dengan meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dari seluruh elemen *stakeholder* yang terlibat baik itu Pemerintah Desa, organisasi lokal, dan masyarakat lokal.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk jurnal dengan judul: **“Pengembangan Desa Wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Dengan demikian, menurut Soekarya (2011:90) menyatakan bahwa : "Pengembangan desa wisata, lingkungan alam dan budaya setempat akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena masyarakat akan berusaha menjaga dan memelihara lingkungannya untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya".

Menurut Muljadi (2009: 27) menyatakan bahwa : Desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain-lain.

Selanjutnya menurut Fandeli (2012:171) secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai berikut :Desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya

Berdasarkan pengertian tersebut maka Desa wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor.

Selanjutnya Hadiwijoyo (2012: 57), menyatakan bahwa : Pengembangan desa wisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang

dilakukan untuk menarik wisatawan, dimana dalam kegiatan dan usaha tersebut dilakukan pula usaha untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung.

Menurut Hadiwijoyo (2005:72) memaparkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata yaitu :

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup
5. Menjamin sustanbilitas lingkungan
6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik
7. Membantu mengembangkan cross cultural learning
8. Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia
9. Mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat
10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat.

Pengelola desa wisata merupakan bagian dari masyarakat dan pemerintah desa, akan tetapi pemerintah desa memiliki kapasitas dan posisi yang berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang hak dan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Selanjutnya menurut Nugroho dan Sutaryono, (2015: 202). Adanya undang-undang tersebut, desa dipandang sebagai sebuah entitas yang mampu memandirikan diri dengan mengelola aset atau potensi yang dimiliki sebagai sumber penghidupan.

Selain itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa : "Desa memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa". Hal ini memperjelas bahwa desa memiliki keleluasaan untuk melakukan pengembangan dan pembangunan desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Disamping itu, adanya undang-undang tersebut juga

membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata.

Hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk lebih memfokuskan pada peran aktor yang ada di desa, yang terdiri dari pemerintah Desa Babakan, masyarakat dan pengelola desa wisata karena mereka merupakan bagian dari sebuah desa yang memiliki hak dan kewenangan dalam pengembangan Desa Wisata Pangandaran. Tidak hanya itu, aktor-aktor tersebut juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam pengembangan desa wisata yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana keterlibatan atau peran dari masing-masing aktor tersebut sehingga mampu membawa desa wisata ini menjadi salah satu desa wisata yang terus mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya. Diharapkan melalui penelitian ini nantinya akan diketahui apakah masing-masing aktor tersebut telah mampu berperan strategis dalam pengembangan desa wisata, atau hanya aktor tertentu saja yang berperan dalam pengembangan yang ada di desa wisata tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa

Babakan kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan pembahasan hasil penelitian terkait dengan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang terlaksana dengan baik karena pemerintah desa kurang memberikan pengakuan dan dukungan serta mempromosikan pariwisata yang dimiliki. Padahal pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Menurut Anindia (2015:9) menyatakan bahwa :Pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang ditunjang dengan keterlibatan masyarakat sejak awal pada setiap aspek pengembangan desa wisata. Peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa : Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik

maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang ditunjang kegiatan promosi kebanggaan masyarakat padahal keberadaan desa wisata merupakan salah satu kebanggaan masyarakat yang harus diberikan perhatian baik dalam bentuk promosi, perhatian maupun dukungan. Promosi pariwisata yang diadakan untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.

Menurut Oka (2007:76) menyatakan bahwa : “Berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi”.

4. Meningkatkan kualitas hidup

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar objek wisata hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang bekerjasama dalam mengembangkan desa wisata selain itu pelibatan masyarakat masih kurang dalam merencanakan pengembangan desa wisata dan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan desa wisata sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan. Kepariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai

kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Anindita (2015:11) menyatakan bahwa : ”Prinsip pengembangan pariwisata salah satunya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata”

5. Menjamin sustabilitas lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat menjamin suistabilitas lingkungan ada di sekitar objek wisata hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang melakukan perlindungan terhadap wisatawan dengan memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi dan Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan kepariwisataan secara adil serta kurangnya pemerintah desa membuat kebijakan terkait perlindungan dan pemeliharaan budaya dan seni tradisional di masyarakat. Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata.

Menurut Waluyo (2007:91). Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata, dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini :

- a. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi.
- b. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
- d. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian :
 - (a) penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah;

(b) kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat

6. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang memelihara karakter dan budaya lokal yang unik karena pemerintah desa kurang memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis dalam mengembangkan desa wisata dan Pemerintah desa kurang melakukan pengembangan desa wisata peka terhadap tradisi dan budaya yang ada di masyarakat serta kurangnya Pemerintah desa menjaga sumber daya alam, sosial dan budaya dalam pengembangan desa wisata. Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan baik sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat lokal, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal khususnya.

Menurut Suwanto (2002:50) menyatakan bahwa : Bentuk pariwisata yang dikembangkan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat dan tidak harus menempatkan setiap anggota masyarakat tuan rumah dalam posisi *inferiory*.

7. Membantu mengembangkan *cross cultural learning*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang membantu mengembangkan *cross cultural learning* karena pemerintah desa kurang membina hubungan yang seimbang antara wisatawan dengan masyarakat setempat dan kurangnya pemerintah desa memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat serta kurangnya Pemerintah desa berupaya bersama-sama dalam menjaga lingkungan.

Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat atau *community based tourism* (CBT) adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran

mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal.

Hadiwijoyo (2012: 71) menyatakan bahwa : "Model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal".

Lebih lanjut Suansri (2003:14) menyatakan bahwa : Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya di dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, melalui hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan faktor budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

8. Menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang menghormati perbedaan-perbedaan cultural dan kehormatan manusia karena Pemerintah desa kurang bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan desa wisata, dengan menghargai tradisi budaya dan agama setempat serta Pemerintah desa kurang menjaga kelestarian lingkungan objek dan daya tarik wisata.

Pembangunan yang berkelanjutan termasuk pembangunan sektor pariwisata harus memperhatikan semua aspek atau factor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah ekosistem, sehingga pembangunan tersebut selain tidak merusak ekosistem fisik, juga harus dapat diterima atau tidak mengganggu system social dan budaya masyarakat setempat.

Menurut Pitana (2009:27) menyatakan bahwa : Pengembangan pariwisata yang berbaur dengan kegiatan masyarakat sehingga sumber daya alam, budaya, industri, kearifan-kearifan lokal, dan sumber daya lokal lainnya yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dijadikan

sebagai obyek dan daya tarik pariwisata yaitu daya tarik wisata tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat lokal mendapatkan keuntungan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya dan menjaga kelestarian sumberdaya tersebut.

9. Mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang mendistribusikan keuntungan yang adil di antara anggota masyarakat karena Pemerintah desa belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat dan Pemerintah desa kurang mendukung dan menjamin pelestarian budaya dan sumber daya masyarakat setempat serta Pemerintah desa kurang memberikan keuntungan ekonomi yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada.

Menurut Pitana (2009:27) menyatakan bahwa :Bentuk pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan memiliki keunggulan tersendiri seperti; penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat, pendukung pelestarian budaya, adanya keyakinan yang lebih menjamin bagi upaya pelestarian sumber daya masyarakat setempat, dan adanya keuntungan ekonomi yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

10. Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan desa wisata di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang menyumbang prosentase yang ditentukan bagi income proyek masyarakat karena Pemerintah desa belum merangsang tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata dan Pemerintah desa kurang melaksanakan pengembangan desa wisata secara efektif dan efisien serta kurangnya

Pemerintah desa melaksanakan pengembangan desa wisata secara akuntabel sehingga memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Anindita (2015:13) menyatakan bahwa : Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

2. Hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Adanya hambatan-hambatan dalam pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemerintah daerah memberikan dukungan dalam membantu mempromosikan desa wisata selain itu masih kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengembangkan keberadaan desa wisata.
- b. Kurangnya masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata sehingga menyebabkan keberadaan desa wisata belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga terdapat beberapa fasilitas yang telah dibangun belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Kurangnya anggaran yang disediakan untuk melakukan promosi kepada masyarakat serta kurangnya dukungan dari dinas pariwisata dalam membantu mempromosikan keberadaan desa wisata secara nasional.
- d. Kurangnya kreativitas dari masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata sehingga keberadaanya belum memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian masyarakat

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adisasmita (2013 :2) mengungkapkan bahwa : Dalam melaksanakan pembangunan di daerah perdesaan menghadapi hambatan dan kendala yang tidak ringan dilihat dari aspek geografis, tipologis, demografis, ketersediaan sarana prasarana, kelemahan dalam akses modal dan informasi pasar, kemampuan

sumberdaya manusia (SDM) yang lemah, partisipasi masyarakat masih belum secara proaktif, kemampuan kelembagaan perdesaan masih lemah dan masih banyak kelemahan operasional dan fungsional lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya pengembangan desa wisata tentu adanya faktor pendukung, disamping terdapat pula faktor penghambatnya. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar faktor pendukung dan penghambatnya.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Menurut Soewarno (2004: 52) pengelolaan kawasan wisata harus mengacu pada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- a. Prinsip keadilan antar generasi, element kunci dari prinsip ini adalah masyarakat satu generasi dan generasi berikutnya adalah mitra.
- b. Prinsip keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan fenomena seperti: beban dari permasalahan lingkungan yang dipikul oleh masyarakat, kemiskinan yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan.
- c. Prinsip pencegahan dini. Dalam penerapan prinsip ini pengambilan keputusan harus dilandasi oleh: evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.
- d. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati.
- e. Prinsip internalitas biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Gagasan dari prinsip ini adalah biaya lingkungan dan sosial harus diintegrasikan kedalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya alam, sedangkan mekanisme intensif berupa program peringkat kinerja yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat melalui sublikasi kinerja secara periodik.

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut dan menangani berbagai kendala dalam pengembangan desa wisata, pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran melakukan upaya-upaya yang antara lain sebagai berikut :

- e. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk dapat membantu pengembangan desa wisata melalui peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama
- f. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di desa sehingga masyarakat dapat mengambil peran dalam membuat keputusan pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.
- g. Memberikan dukungan anggaran yang memadai serta meningkatkan swadaya masyarakat guna menambah anggaran yang terbatas dari pemerintah desa sehingga keberadaan desa wisata dapat dikembangkan. Selain itu melakukan pendekatan kepada Dinas KBP3A sebagai *leading sector* pengembangan desa wisata karena merupakan program kerja kampung KB
- h. Mengadakan pelatihan bagi pelaku atau pengelola objek desa wisata sehingga mampu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan desa wisata seperti meningkatkan kemampuan pengrajin yang ada di desa wisata sehingga dapat memanfaatkan keberadaan desa wisata dalam rangka meningkatkan pendapatannya.

Dengan demikian dalam pengembangan desa wisata maka perlu dilakukan upaya melestarikan kawasan wisata agar tetap terjaga maka perlu dilakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan terciptanya daya dukung lingkungan kawasan wisata, yang akan selalu memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Dalam hal ini, sebisa mungkin pengelola harus senantiasa bekerjasama dengan para pengunjung dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan kawasan wisata.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Babakan, selain itu pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata sehingga keberadaan desa wisata di Desa Babakan kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain dikarenakan kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan labolatorium nyamuk yang ada kurang mendapat pemeliharaan sehingga keberadaanya kurang menarik minat wisatawan untuk datang, dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai sehingga apabila dipromosikan secara rutin takut mengecewakan pengunjung serta masih kurangnya strategi yang dilaksanakan oleh pengelola yang disebabkan oleh dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata masih belum optimal.
3. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran maka dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan keberadaan desa wisata, memberikan dukungan anggaran yang dapat membantu pengelola dalam melakukan pengembangan desa wisata, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah Desa Babakan dalam mengembangkan desa wisata melakukan kerjasama dengan Dinas KBP3A dan Dinas Pariwisata untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti mengadakan kegiatan pentas seni maupun kegiatan sosialisasi program KB di desa wisata sehingga melalui kegiatan tersebut dapat mempromosikan desa wisata kepada pihak lain.
2. Sebaiknya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata seperti travel agen sehingga dapat membantu memperkenalkan daya tarik desa wisata kepada pihak lain dan dapat membawa wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata. Selain itu meningkatkan dana swadaya dari masyarakat dalam membantu pengembangan desa wisata sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah desa saja karena nantinya manfaatnya juga untuk masyarakat setempat.
3. Sebaiknya pemerintah desa dapat mengatasi hambatan-hambatan pengembangan desa wisata dengan berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam mengembangkan desa wisata dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan serta pelatihan kepada pengelola desa wisata sehingga kegiatan tersebut dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fandeli, C. M. 2012. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Hadiwijoyo. 2005. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- _____. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Oka. 2007. *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*. Bandung. Penerbit Angkasa. Hal 33.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutaryono, dkk. 2015. *Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Sleman Yogyakarta: (FPPD).
- Suwantoro. 2002. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo. L. 2007. *Mikrobiologi Umum*. UMM Press. Malang. WHO. 2013.